



## Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD Kabupaten Jombang

Laela Rizqia<sup>1</sup>, Tituk Diah Widajantie<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UPN "Veteran" Jawa Timur

<sup>1</sup>[18013010201@student.upnjatim.ac.id](mailto:18013010201@student.upnjatim.ac.id); <sup>2</sup>[tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id](mailto:tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id)

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Diterima 15 Mei 2022

Disetujui 20 Mei 2022

Diterbitkan 25 Mei 2022

#### Kata kunci:

Sistem pengendalian internal, Keadilan organisasi, *Good governance*, Fraud; Pembangunan daerah

#### Keywords :

*Internal control system, Organizational Justice, Good Governance, Fraud; Regional development*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menunjukkan pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern, keadilan organisasi dan implementasi tata kelola yang baik terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di OPD Kabupaten Jombang. Kecurangan akuntansi harus dipantau secara memadai karena dapat berdampak pada pelayanan masyarakat dan merugikan pembangunan daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan penelitian dan penyebaran kuesioner. Sampel penelitian diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 81 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Penguji hipotesis menggunakan alat uji statistik yaitu *Partial Least Square (PLS)* dengan menggunakan *software WarpPLS 8.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dan keadilan organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan implementasi *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### ABSTRACT

*This study aims to examine and prove the effect of the effectiveness of internal controls system, organizational justice, and good governance practices against trends in accounting fraud in OPD Jombang Regency. Accounting fraud must be followed up properly because it can have an impact on services to the community and hinder regional development. This type of research is quantitative research. The source of information in this study is the primary source of information by conducting research and distributing questionnaires. The research sample was taken using purposive sampling technique with a total of 81 respondents. Information analysis method used is multiple regression analysis method. The hypothesis tester uses a statistical test tool, namely Partial Least Square (PLS) with the help of WarpPLS 8.0 programming. The results showed that the effectiveness of the internal control system and organizational justice had a significant effect on the tendency of accounting fraud. Meanwhile, the implementation of good governance has no significant effect on the tendency of accounting fraud.*



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Krisis ekonomi tahun 1998 dikaitkan dengan dampak penipuan yang meluas di pemerintahan. Hal ini juga menginspirasi publik untuk mempromosikan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi (Eti Rohaeti, 2021). Pemerintah sebagai subjek kepercayaan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya secara efisien dan efektif, salah satunya adalah untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Namun, banyak praktik kecurangan yang secara langsung dapat merugikan negara dan masyarakat secara tidak langsung (Adinda, 2015).

Fraud merupakan salah satu ancaman utama yang dihadapi suatu entitas. Pada dasarnya fraud adalah sejenis parasit jaringan sosial ini merusak struktur pemerintahan dan menjadi kendala utama penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah secara umum (Hidayatun & Juliarto, 2019). Secara umum, fraud adalah tindakan ilegal yang dilakukan oleh orang-orang di dalam dan di luar organisasi, dengan tujuan mencapai keuntungan pribadi atau kolektif dengan merugikan pihak lain secara langsung. Fraud dapat mencakup berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white*

*collar crime*) termasuk pencurian, penyalahgunaan properti, penyalahgunaan informasi, penyalahgunaan kewajiban, penghilangan atau menyembunyikan fakta, pemalsuan kebenaran, termasuk korupsi (Albar & Fitri, 2018). Maraknya praktik kecurangan, khususnya korupsi di lingkungan pemerintahan, menunjukkan realitas penegakan hukum oleh pemerintah.

Fraud dalam bidang pemerintahan memang ada kasus-kasus pemerasan seperti pencemaran nama baik, namun hal itu dipersepsikan sebagai kegiatan pejabat pemerintah, baik legislator maupun pegawai pemerintah, serta berbagai pihak yang dikaitkan dengan tindakan yang tidak wajar dan melanggar hukum dengan menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan otoritas terkait untuk kepentingan sepihak (Eti Rohaeti, 2021). Organisasi sektor publik digunakan oleh elemen pemerintah yang sangat tidak bertanggungjawab untuk peningkatan individu. Misalnya, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan langkah demi langkah tanpa membayar jumlah yang tetap. melakukan penilaian klinis terlebih dahulu, atau karena pelanggaran lalu lintas kriminal, dengan memberikan sejumlah uang untuk polisi di tempat kerja (Gayatri et al., 2017). Kasus suap seperti ini masuk dalam kategori kasus suap pemerasan ekonomi.

Isu korupsi di Indonesia merupakan salah satu masalah utama negara karena penipuan seperti suap semakin sering terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 677 kasus korupsi antara tahun 2016 hingga pertengahan 2021, kasus itu terjadi di berbagai institusi. Tindak pidana korupsi terbanyak terjadi pada 312 kasus di pemerintahan kabupaten dan kota, disusul oleh 180 kementerian dan 82 pemerintah provinsi. Di sisi lain, ada 66 kasus korupsi di BUMN/BUMD. Selanjutnya, jika dilihat dari jumlah tindak pidana korupsi di DPR dan DPRD, ada lebih dari 35 kasus dan lebih dari 2 kasus di KPK. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecenderungan korupsi ada di pemerintah daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah terus meningkat (Firmansyah, 2021).

Kabupaten Jombang merupakan salah satu pemerintah daerah di Jawa Timur. Kabupaten Jombang merupakan daerah yang terus memiliki rekam jejak yang lebih baik dalam mengelola sistem akuntansi keuangan. Peningkatan yang berhasil ini sudah yang kedelapankali. Pencapaian ini terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jombang tahun anggaran 2020 (Jombangkab.go.id, 2021). Pencapaian tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kecurangan akuntansi didalamnya. Salah satu kasus Kabupaten Jombang yang menjadi perhatian karena adanya kasus penipuan yang dilakukan oleh pengurus organisasi atau pihak internal instansi itu sendiri dilakukan oleh Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko pada tahun 2018. Nyono Suharli Wihandoko Bupati Jombang, tersangkut kasus korupsi pemberian izin pengelolaan jabatan kepada Pemerintah Kabupaten Jombang. Selama masa OTT, KPK menyita Rp 25 juta dan USD 9.500 (Sutono, 2018). Selain itu, ada kasus terbaru pada tahun 2021, terkait korupsi di perpustakaan desa. Kejari Jombang dicalonkan oleh Cucuk Suhardi, penyedia layanan proyek perpustakaan desa, sebagai tersangka pada 2019. Keputusan itu diambil setelah penyidik menemukan bukti pemalsuan identitas tiga perusahaan pemenang tender proyek tersebut. Akibat perbuatannya itu, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 328 juta. (Mamduh, 2021). Dari sekian banyak kasus korupsi yang diuraikan di atas, terlihat bahwa kasus-kasus penipuan sering terjadi di sektor pemerintahan Kabupaten Jombang.

Teori yang menjelaskan mengapa seorang individu melakukan tindakan kecurangan cukup beragam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fraud triangle theory. Fraud triangle theory dijelaskan oleh Cressey (1953) bahwa ada tiga faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (fraud), yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*). Tekanan adalah pendorong keuangan yang mendorong individu untuk melakukan penipuan. Peluang merupakan pemicu seseorang untuk melakukan kecurangan setelah melihat kemampuan dan keadaan saat ini. Rasionalisasi atau pembenaran adalah penyebab kecurangan yang paling membingungkan karena melibatkan pemikiran abstrak individu yang dipengaruhi oleh faktor dalam dan luar (Eti Rohaeti, 2021). Pada saat yang sama, ada tiga jenis penipuan seperti penyelewengan aset, penipuan laporan keuangan dan penyuaipan (Saftarini et al., 2015)

*The American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) mendefinisikan bahwa pengendalian internal organisasi sangat penting untuk melindungi perusahaan dari kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan pelanggaran. Untuk mencapai efisiensi, efisiensi, transparansi, dan pengelolaan keuangan publik, pengendalian kinerja kegiatan pemerintah harus dilakukan dengan menerapkan unsur-unsur pengendalian internal (Saftarini et al., 2015). Jika pengendalian internal lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan

lebih besar. Sebaliknya jika pengendalian internal kuat maka kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir (Wakhida, 2012). Efektivitas pengendalian internal memiliki pengaruh besar dalam mencegah tren penipuan akuntansi.

Faktor lain yang mempengaruhi individu atau seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan adalah kurangnya rasa ada adil dalam manajemen tempat karyawan bekerja. Keadilan organisasi adalah istilah yang menggambarkan keadilan atau kesetaraan di tempat kerja, dengan fokus pada bagaimana karyawan menyimpulkan apakah mereka diperlakukan secara adil di lingkungan kerja, dan kemudian menarik kesimpulan bagaimana hal itu mempengaruhi variabel terkait pekerjaan lainnya. Karyawan akan memandang organisasi mereka sebagai organisasi yang adil ketika mereka percaya bahwa hasil yang mereka terima didapatkan dengan adil. Jika organisasi yang dirasakan karyawan cenderung kurang tidak memihak, hal itu mengurangi keterlibatan dan mengarah pada kecenderungan penipuan akuntansi. (Chintyana et al., 2017).

Faktor terakhir yang mempengaruhi terjadinya kecurangan akuntansi adalah terciptanya tata kelola yang baik. *Forum For Corporate Governance In Indonesia* (FCGI) mendefinisikan tata kelola yang diinginkan karena pedoman yang mengatur hubungan antara pemilik, dewan, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan dalam dan berbagai peristiwa mengenai hak dan kewajiban mereka, atau sebagai sistem untuk mengelola kegiatan usaha (Saftarini et al., 2015). Hal ini dapat terjadi pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dimana kecurangan terjadi ketika instansi pemerintah khususnya sektor pemerintah tidak dikelola dengan baik.

Meningkatnya kasus fraud seperti korupsi harus dijadikan sebagai evaluasi dan perbaikan organisasi yang lebih baik. Penelitian ini sangat penting dilakukan dengan menjangkau persepsi pegawai sektor publik, sebagai upaya melayani masyarakat untuk kepentingan publik. Untuk mengidentifikasi tren isu kecurangan di kalangan masyarakat dengan beberapa faktor seperti sistem pengendalian internal, keadilan organisasi dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Efektivitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi dan implementasi *good governance* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada OPD kabupaten Jombang.

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Jombang, motivasi penulis ketika mengambil topik pemerintahan Kabupaten Jombang karena berbagai pertimbangan seperti ketertarikan peneliti terhadap fenomena kecurangan yang terjadi. Selain itu, tren korupsi yang terjadi di pemerintahan terus meningkat. Motivasi lain penulis adalah kurangnya penelitian yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Jombang khususnya pada tren kecurangan akuntansi. Dan juga dengan asumsi bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir, peneliti melakukan penelitian pada pemerintah daerah terdekat yaitu Pemerintah Daerah Jombang dengan memperhatikan prosedur kesehatan yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja di OPD Kabupaten Jombang. Dalam penelitian ini terdapat 6 Badan dan 21 Dinas OPD di Kabupaten Jombang yang dijadikan sebagai populasi. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria Kepala OPD, kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset, Bendahara dan Pelaksana Administrasi Keuangan dengan jumlah responden sebanyak 81 orang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survei, yaitu dengan memberikan kuesioner yang langsung disebarkan kepada kriteria responden di Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Responden**

Kuesioner yang disebarkan sebanyak 81 kuesioner, 90 di antaranya dikembalikan, tetapi memenuhi persyaratan hanya 81 kuesioner. Dalam survei ini, profil responden diurutkan berdasarkan jumlah responden, jenis kelamin, usia, jabatan, pendidikan terakhir, dan masa kerja.

**Tabel 1 Deskripsi Kuesioner Responden**

Keterangan	Frekuensi	Presentase
Kuesioner yang disebar	108	100%
Kuesioner yang kembali	90	83%
Kuesioner yang tidak kembali	18	17%
Kuesioner yang memenuhi syarat	81	75%
Kuesioner yang tidak memenuhi syarat	9	8%

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

### Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut tabel 2 adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pegawai Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang:

**Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	33	41%
2	Perempuan	48	59%
	Total	81	100%

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 48 orang (59%), dan sisanya 33 orang (41%) responden yang berjenis kelamin laki-laki.

### Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Berikut tabel 3 adalah karakteristik responden berdasarkan umur pegawai Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang:

**Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan Umur**

No	Umur	Jumlah	Presentase
1	21-30	10	12%
2	31-40	12	15%
3	41-50	24	30%
4	>50	21	26%
Total	67	83%	

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

Tabel 3 menunjukkan bahwa mayoritas responden berumur 41-50 tahun, yaitu sebanyak 24 orang (30%). Responden yang berumur 21-30 tahun sebanyak 10 orang (12%), sedangkan sisanya berumur 31-40 tahun sebanyak 12 orang (15%), dan >50 tahun sebanyak 21 orang (26%) dari total responden yang mengisi kuesioner. Sebanyak 14 responden (17%) tidak mengisi data pribadi mengenai umur.

### Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Berikut tabel 4 adalah karakteristik responden berdasarkan jabatan pegawai Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang:

**Tabel 4 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Kepala Badan/Dinas	14	17%
2	Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	25	31%
3	Bendahara	24	30%
4	Pelaksana Adm. Keuangan	18	22%
	Total	81	100%

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

Tabel 4 menjelaskan bahwa responden yang paling banyak mengisi kuesioner menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yaitu sebanyak 25 orang (31%). Responden yang

menjabat sebagai Kepala Badan/Dinas sebanyak 14 orang (17%), sedangkan responden lainnya yang menjabat sebagai Bendahara sebanyak 24 orang (30%) dan yang menjabat sebagai Pelaksana Administrasi Keuangan sebanyak 18 orang (22%).

### Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berikut tabel 5 adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang:

**Tabel 5 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMA	9	11%
2	D3	3	4%
3	S1	45	56%
4	S2	14	17%
Total		71	88%

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan S1 yakni sebanyak 45 orang (56%). Responden yang berpendidikan SMA sebanyak 9 orang (11%), sedangkan sisanya memiliki tingkat pendidikan D3 sebanyak 3 orang (4%), dan S2 sebanyak 14 orang (17%) dari total responden yang mengisi kuesioner. Sebanyak 10 (12%) responden tidak mengisi data pribadi mengenai tingkat pendidikan.

### Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berikut tabel 6 adalah karakteristik responden berdasarkan jabatan pegawai Badan dan Dinas Pemerintah Kabupaten Jombang:

**Tabel 6 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

No	Lama Bekerja	Jumlah	Presentase
1	1-10 tahun	12	15%
2	11-20 tahun	15	19%
3	21-30 tahun	21	26%
4	31-40 tahun	5	6%
Total		53	65%

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2022)

Tabel 6 menunjukkan bahwa responden yang paling banyak memiliki masa kerja 21-30 tahun yaitu sebanyak 21 orang (26%). Responden yang masa kerja 1-10 tahun sebanyak 12 orang (15%), sedangkan sisanya memiliki masa kerja 11-20 tahun sebanyak 15 orang (19%) dan masa kerja 31-40 tahun sebanyak 5 orang (6%) dari total responden yang mengisi kuesioner. Sebanyak 28 (35%) responden tidak mengisi data pribadi mengenai lama bekerja.

### Analisis Partial Least Square (PLS)

#### Uji Outer Model

Uji *outer model* digunakan untuk mengetahui validitas dan reabilitas suatu data dalam PLS. Pengujian validitas data yang dilakukan pada *outer model* terbagi menjadi dua yaitu *validitas convergent* dan *validitas discriminant*. Mengenai reabilitas dapat diukur menggunakan *composite reliability*.

#### Uji Validitas Data

#### Validitas Konvergen

**Tabel 7 Outer Loading (Tahap 1)**

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Hasil
Efektivitas Sistem	X1.1	0,858	Valid
	X1.2	0,826	Valid
Pengendalian	X1.3	0,813	Valid

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Hasil
Internal (X1)	X1.4	0,735	Valid
	X1.5	0,862	Valid
	X2.1	0,733	Valid
Keadilan Organisasi (X2)	X2.2	0,742	Valid
	X2.3	0,770	Valid
	X2.4	0,791	Valid
	X2.5	0,691	Tidak Valid
	X3.1	0,710	Valid
Implementasi Good Governance (X3)	X3.2	0,811	Valid
	X3.3	0,626	Tidak Valid
	X3.4	0,838	Valid
	X3.5	0,773	Valid
	Y.1	0,548	Tidak Valid
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Y.2	0,741	Valid
	Y.3	0,589	Tidak Valid
	Y.4	0,762	Valid
	Y.5	0,802	Valid
	Y.6	0,760	Valid
	Y.7	0,842	Valid
	Y.8	0,879	Valid
	Y.9	0,827	Valid

Sumber: *Output PLS*

Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar nilai *loading factor* yang dihasilkan lebih dari 0,7 kecuali pada indikator (X2.5, X3.3, Y.1 dan Y.3) menunjukkan bahwa nilai *loading factor* kurang dari 0,7, maka dilakukan pengujian kembali dengan mengeliminasi indikator yang nilai *loading factor* kurang dari 0,7.

**Tabel 8 Outer Loading (Tahap 2)**

Variabel	Indikator	Nilai Loading	Type (a)	P Value	Hasil
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (X1)	X1.1	0,858	Reflect	<0,001	Valid
	X1.2	0,826	Reflect	<0,001	Valid
	X1.3	0,813	Reflect	<0,001	Valid
	X1.4	0,735	Reflect	<0,001	Valid
	X1.5	0,862	Reflect	<0,001	Valid
Keadilan Organisasi (X2)	X2.1	0,782	Reflect	<0,001	Valid
	X2.2	0,766	Reflect	<0,001	Valid
	X2.3	0,793	Reflect	<0,001	Valid
	X2.4	0,759	Reflect	<0,001	Valid
Implementasi Good Governance (X3)	X3.1	0,733	Reflect	<0,001	Valid
	X3.2	0,800	Reflect	<0,001	Valid
	X3.4	0,853	Reflect	<0,001	Valid
	X3.5	0,809	Reflect	<0,001	Valid
	Y.2	0,739	Reflect	<0,001	Valid
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Y.4	0,782	Reflect	<0,001	Valid
	Y.5	0,821	Reflect	<0,001	Valid
	Y.6	0,789	Reflect	<0,001	Valid
	Y.7	0,840	Reflect	<0,001	Valid
	Y.8	0,867	Reflect	<0,001	Valid
Y.9	0,846	Reflect	<0,001	Valid	

Sumber: *Output PLS*

Setelah dilakukan pengujian kembali dengan mengeliminasi indikator yang nilainya kurang dari 0,7 maka tabel 8 menunjukkan bahwa semua indikator memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,7 dan tingkat signifikan yang dihasilkan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator variabel X1, X2, X3 dan Y adalah valid secara signifikan.

*Validitas convergent* juga bisa dilihat dari nilai AVE untuk masing-masing konstruk. Tabel 9 akan disajikan nilai AVE untuk seluruh variabel.

**Tabel 9 Nilai AVE**

Variabel	AVE
X1	0,673
X2	0,605
X3	0,640
Y	0,661

Sumber: *Output PLS*

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan jika semua konstruk memenuhi kriteria valid karena AVE lebih dari 0,5.

### Uji Validitas Diskriminan

**Tabel 10 Discriminant Validity**

Indikator	X1	X2	X3	Y
X1.1	(0.858)	0.537	0.630	-0.178
X1.2	(0.826)	0.518	0.553	-0.335
X1.3	(0.813)	0.578	0.545	-0.210
X1.4	(0.735)	0.487	0.430	-0.161
X1.5	(0.862)	0.636	0.551	-0.204
X2.1	0.578	(0.782)	0.527	-0.374
X2.2	0.559	(0.776)	0.561	-0.146
X2.3	0.579	(0.793)	0.669	-0.382
X2.4	0.374	(0.759)	0.545	-0.112
X3.1	0.371	0.442	(0.733)	-0.146
X3.2	0.481	0.564	(0.800)	-0.229
X3.4	0.650	0.702	(0.853)	-0.269
X3.5	0.602	0.646	(0.809)	-0.208
Y.2	-0.318	-0.329	-0.232	(0.739)
Y.4	-0.233	-0.385	-0.356	(0.782)
Y.5	-0.139	-0.134	-0.140	(0.821)
Y.6	-0.051	-0.194	-0.048	(0.789)
Y.7	-0.390	-0.398	-0.386	(0.840)
Y.8	-0.225	-0.255	-0.189	(0.867)
Y.9	-0.162	-0.185	-0.182	(0.846)

Sumber: *Output PLS*

Tabel 10 menunjukkan hasil validitas diskriminan dari model penelitian dengan melihat *cross loadingnya*. Berdasarkan nilai *cross loading*, dapat diketahui bahwa semua indikator yang membentuk variabel efektivitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, implementasi *good governance* dan kecenderungan kecurangan akuntansi telah memenuhi *discriminant validity* karena memiliki nilai *cross loading* terbesar untuk variabel yang dibentuknya dan tidak ada variabel lain.

Selain melihat nilai *cross loading*, untuk mengevaluasi validitas diskriminan dapat dilihat dengan mempertimbangkan akar kuadrat dari AVE dari setiap konfigurasi atau variabel laten. Jika akar kuadrat dari AVE pada setiap konfigurasi lebih besar dari korelasi antara dua konfigurasi dalam model, maka identifikasi model lebih valid. Jika nilai AVE lebih besar dari 0,5 maka dinyatakan valid. Korelasi antara komponen dan nilai akar kuadrat AVE, dapat dilihat pada tabel 11.

**Tabel 11 Nilai Kuadrat AVE**

Indikator	X1	X2	X3	Y
X1	(0.820)	0.673	0.663	-0.266
X2	0.673	(0.778)	0.741	-0.328
X3	0.663	0.741	(0.800)	-0.269

Y	-0.266	-0.328	-0.269	(0.813)
---	--------	--------	--------	---------

Sumber: *Output PLS*

Dari tabel 11 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk variabel memiliki nilai AVE diatas 0,50 sebagaimana kriteria yang direkomendasikan. Dari hasil uji *discriminant validity* dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel laten memiliki validitas diskriminan yang baik.

### Uji Reliabilitas

Dalam penelitian ini, hasil uji *composite reliability* menunjukkan pada tabel 12 sebagai berikut:

**Tabel 12 Nilai Uji Reliabilitas**

Variabel	<i>composite reliability</i>	<i>cronbach's alpha</i>	Keterangan
X1	0.911	0.877	Reliabel
X2	0.859	0.782	Reliabel
X3	0.876	0.811	Reliabel
Y	0.932	0.914	Reliabel

Sumber: *Output PLS*

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai hasil uji *composite reliability* dan *cronbach's alpha* nilai setiap variabel laten lebih dari 0,7. Artinya, indikator-indikator tersebut konsisten dalam pengukuran ini.

### Evaluasi Model Struktural (Inner Model) R-Square (R<sup>2</sup>)

**Tabel 13 Nilai R-Square**

Variabel	<i>R-Square</i>
Y	0,221

Sumber: *Output PLS*

Hasil perhitungan R<sup>2</sup> pada tabel 13 menunjukkan bahwa nilai R<sup>2</sup> berada pada nilai 0,221. Nilai R- Square 0,67, 0,33 dan 0,19 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate dan lemah. Dalam model penelitian ini, variabel tergolong moderat. *R-Square* digunakan untuk mengukur tingkat perubahan variabel independen terhadap variabel dependen.

### Predictive Relevance (Q<sup>2</sup>)

*Predictive Relevance* (Q<sup>2</sup>) mengukur seberapa tingkatan pengamatan yang dihasilkan dan perkiraan parameter model struktural.

**Tabel 14 Nilai Q<sup>2</sup>**

Variabel	<i>Predictive Relevance (Q<sup>2</sup>)</i>
Y	0,179

Sumber: *Output PLS*

Pada penelitian *Q-Square* menunjukkan adanya nilai 0,179 yang lebih besar dari nol (0), menunjukkan adanya nilai prediksi yang terkait dengan model.

### Pengujian Hipotesis

Tahap ini bertujuan untuk menentukan pentingnya dampak antar variabel dan menilai arah dampak pada masing-masing jalur hipotesis. Pengujian hipotesis ini menggunakan PLS dibantu dengan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan tingkat probabilitas (P-Value) pada taraf signifikansi 5%.



**Tabel 15 Hasil Path Coefficient dan P-Value**

Variabel	Path Coefficient	P-Value	Result
Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (X1) -> Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)	-0,308	0,002	H <sub>1</sub> Diterima
Keadilan Organisasi (X2) -> Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)	-0,208	0,025	H <sub>2</sub> Diterima
Implementasi Good Governance (X3) -> Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Y)	-0,067	0,270	H <sub>3</sub> Ditolak

### **Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Berdasarkan hasil uji pada tabel 15 dapat dinyatakan bahwa variabel efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar -0,038 dan P-Value sebesar  $0,002 < 0,05$ , syarat diterima hipotesis yaitu nilai koefisien regresi bernilai positif dan P-Value  $< 0,05$ . Dengan demikian H<sub>1</sub> dinyatakan diterima bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **Pengaruh Keadilan Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Berdasarkan hasil uji pada tabel 15 dapat dinyatakan bahwa variabel keadilan organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar -0,208 dan P-Value sebesar  $0,025 < 0,05$ , syarat diterima hipotesis yaitu nilai koefisien regresi bernilai positif dan P-Value  $< 0,05$ . Dengan demikian H<sub>2</sub> dinyatakan diterima bahwa keadilan organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **Pengaruh Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi**

Berdasarkan hasil uji pada tabel 15 dapat dinyatakan bahwa variabel implementasi *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar -0,067 dan P-Value sebesar  $0,270 > 0,05$ , syarat diterima hipotesis yaitu nilai koefisien regresi bernilai positif dan P-Value  $< 0,05$ . Dengan demikian H<sub>3</sub> dinyatakan ditolak bahwa implementasi *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **Pembahasan**

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi sehingga H<sub>1</sub> diterima. Artinya semakin baik pengendalian internal OPD yang dimiliki, semakin rendah kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi. Jika pengendalian internal buruk, maka akan menyebabkan kecenderungan meningkatnya kecurangan akuntansi. Jika ada pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap aktivitas operasi di dalam lembaga, hal ini dapat membantu memulihkan praktik kecurangan. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015), Chintyana (2017), Singgih (2018), Eti (2021) yang menyatakan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap fraud.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa keadilan organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi sehingga H<sub>2</sub> dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang diterima dari karyawan sudah sesuai dengan keadilan pekerjaan saat ini. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa keadilan organisasi tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap potensi penipuan akuntansi OPD. Dengan kata lain, semakin adil organisasi yang diterima karyawan, semakin besar kemungkinan mereka melakukan kecurangan di OPD Kabupaten Jombang. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chintyana (2017) dan Antarwiyati (2017) yang menyatakan keadilan organisai berpengaruh signifikan terhadap fraud.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pembentukan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi, sehingga H<sub>3</sub> ditolak. OPD Kabupaten Jombang belum menerapkan dengan baik prinsip-prinsip *good governance* yaitu prinsip partisipasi. Partisipasi dikaitkan dengan pengambilan keputusan yang demokratis, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berbicara, pemenuhan keinginan rakyat. Dalam hal ini, OPD tidak memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk menyampaikan komentar atau pendapat yang

menguntungkan kepada instansi tersebut. Ini berarti bahwa semakin baik OPD memiliki tata kelola yang baik, semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini berlawanan dengan hasil penelitian Saftarini (2015) dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa implementasi good governance berpengaruh signifikan terhadap fraud.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan, pengujian, dan analisis data yang telah dilakukan tentang pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, dan implementasi good governance terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan pada OPD Kabupaten Jombang diperoleh bukti empiris dan dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan implementasi good governance tidak berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Melalui penelitian lebih lanjut, kuesioner yang digunakan dalam survei harus diperbaiki terlebih dahulu untuk memastikan bahwa kuesioner yang digunakan nantinya memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Juga akan dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan metode wawancara agar tidak bias serta menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuisisioner. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel agar diperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi dan dapat menambahkan indikator – indikator penilai variabel yang lebih banyak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, yanita maya. (2015). Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (fraud) di sektor pemerintahan Kabupaten Klaten. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.
- Albar, T. M., & Fitri, F. A. (2018). Pengaruh komitmen organisasi, etika organisasi, keadilan kompensasi, dan sistem pengendalian internal terhadap fraud (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 527–537.
- Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. (2017). Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 12(2), 157–166. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art7>
- Chintyana, N. M. G., Wahyuni, M. A., & Julianto, P. (2017). Pengaruh efektifitas sistem pengendalian internal, keadilan organisasi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(1).
- Eti Rohaeti, A. N. (2021). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia*, 11(1), 1–9.
- Firmansyah, I. (2021). *58 Persen pidana korupsi yang ditangani KPK terjadi di pemda*. Republika.Com.
- Gayatri, N., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh kepuasan kompensasi, asimetri informasi, sistem pengendalian internal terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (fraud) dalam organisasi (Studi Empiris pada Organisasi Sektor Publik di Kabupaten Buleleng). *Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–12.
- Hidayatun, F., & Juliaro, A. (2019). Fraud triangle dan fraud diamond model dalam prediksi kecurangan laporan keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4).
- Jombangkab.go.id. (2021). *Kabupaten Jombang raih opini WTP Kali Kedelapan Di Tahun 2021*. Jombangkab.Go.Id.
- Mamduh, R. (2021). *Tahap dua, cucuk ditahan kasus korupsi pengadaan perpustakaan desa*. Radarjombang.Jawapos.Com.
- Saftarini, P. R., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh efektivitas pengendalian internal, asimetri informasi dan implementasi good governance terhadap kecenderungan

- kecurangan (fraud) akuntansi (Studi empiris pada Skpd di Kabupaten Bangli). *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–12.
- Sari, N. L. P. P., Yuniarta, G. A., & Adiputra, I. M. P. (2015). Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, persepsi kesesuaian kompensasi dan implementasi good governance terhadap kecenderungan fraud (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–11.
- Singgih, D. W., Yuliati, N. N., & Amrul, R. (2018). Pengaruh pengendalian internal dan integritas pada kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi kasus pada dinas SKPD Kota Mataram). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.29303/jaa.v2i1.9>
- Sutono. (2018). *KPK Tetapkan Bupati Jombang sebagai Tersangka*. Nasional.Kompas.Co.
- Wakhida, H. (2012). Internal dan integritas pada kecenderungan kecurangan. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29–39.